



Lembar Fakta IGJ, 13 Februari 2021

Subsidi Perikanan Indonesia

Chong Zhang¹

Background:

Over-kapitalisasi sumber daya perikanan global merupakan ancaman utama tidak hanya bagi keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga bagi ketahanan pangan, mata pencaharian dan ekonomi (Tipping & Irschlinger 2020). Negosiasi WTO tentang subsidi perikanan diluncurkan pada Konferensi Tingkat Menteri Doha pada tahun 2001. WTO (2002) mendefinisikan subsidi Perikanan sebagai 'tindakan atau kelambanan pemerintah yang spesifik untuk industri perikanan dan yang memodifikasi - dengan meningkatkan atau menurunkan - potensi keuntungan oleh industri dalam jangka pendek, menengah atau panjang.' Pembentukan disiplin subsidi perikanan dituntut karena beberapa subsidi perikanan telah dikritik sebagai ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya laut yang berkontribusi pada banyak masalah termasuk penangkapan ikan berlebihan, kelebihan kapasitas, ilegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU).

Konferensi Tingkat Menteri Kesebelas tidak mencapai hasil yang substantif dalam negosiasi mengenai subsidi perikanan karena kurangnya sudut pandang yang sama tentang pengaruh subsidi dan konflik kepentingan antar peserta.

WTO (2002) mengklasifikasikan subsidi Perikanan ke dalam empat kategori utama:

Kategori 1: Transfer keuangan langsung- mencakup semua pembayaran langsung oleh pemerintah ke industri perikanan (*misalnya hibah investasi*)

1. Mahasiswa Western Sydney University Studi Hukum yang mengikuti program magang ACICIS di Indonesia for Global Justice 2021

Kategori 2: layanan dan transfer keuangan tidak langsung - intervensi pemerintah aktif dan eksplisit lainnya tetapi yang tercakup dalam Kategori 1 (*misalnya pembebasan pajak dan bea*)

Kategori 3: intervensi dengan efek jangka pendek dan jangka panjang yang berbeda - intervensi pemerintah yang memiliki dampak ekonomi negatif pada industri dalam jangka pendek tetapi pada akhirnya menghasilkan manfaat jangka panjang (*misalnya program perlindungan lingkungan*)

Kategori 4: Kurangnya intervensi- kurangnya intervensi pemerintah yang tidak menyiratkan biaya kepada pemerintah dan nilainya terhadap industri adalah implisit (*misalnya kurangnya langkah-langkah manajemen*)

Subsidi perikanan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berikut berdasarkan efek (Sumaila et al. 2019):

1. Subsidi yang menguntungkan: investasi dalam promosi konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan (*misalnya pengelolaan perikanan*)
2. Subsidi peningkatan kapasitas: program yang saat ini atau berpotensi mendorong kapasitas penangkapan ikan berkembang ke titik di mana eksploitasi sumber daya melebihi hasil berkelanjutan maksimum (MYS), secara efektif mengakibatkan eksploitasi aset modal alam yang berlebihan (*misalnya subsidi bahan bakar*).
3. Subsidi ambigu: subsidi yang berpotensi mengarah pada manajemen berkelanjutan atau eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan, benar-benar tergantung pada situasi (*misalnya pembelian kembali kapal*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14.6	Komponen Utama negosiasi Subsidi Perikanan WTO:
<p>Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi pada kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan yang berlebihan, dan menghilangkan subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan IUU, dan menahan diri untuk memperkenalkan subsidi baru tersebut, mengakui bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan paling tidak maju harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan WTO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Larangan Subsidi untuk Penangkapan Ikan IUU • Larangan Subsidi Mengenai stok ikan yang berlebihan • Larangan Subsidi untuk Penangkapan Ikan Berlebih dan Kelebihan Kapasitas

Perikanan di Indonesia

Menurut Notohamijoya, Wiyata & Billah (2019):

- Estimasi sumber daya perikanan Indonesia saat ini setiap tahun adalah 12,54 juta ton.
- Ikan dan makanan laut merupakan sumber protein utama bagi penduduk Indonesia, mencapai 52% dari asupan proteinnya.
- Perikanan skala kecil menyumbang hampir 90% dari kepemilikan kapal penangkap ikan di Indonesia.
- 80% dari total nelayan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.
- Perlakuan Khusus dan Berbeda: Indonesia mengusulkan untuk mempertahankan subsidi perikanan sebagai langkah pengentasan kemiskinan.
- Didominasi oleh perikanan skala kecil, struktur perikanan Indonesia dinilai tidak merusak lingkungan.
- Keseimbangan antara kesejahteraan nelayan skala kecil dan perlindungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan subsidi perikanan.
- Diperlukan pengelolaan perikanan yang efektif di Indonesia karena saat ini nelayan skala besar lebih cenderung menikmati subsidi perikanan daripada nelayan skala kecil karena kurangnya transparansi.

Efek pada Perikanan Skala Kecil

Menurut PANG (2020):

- Nelayan dalam skala kecil perikanan tidak dilindungi atau didukung.
- Masalah kepatuhan dan prosedural dapat menyebabkan pelanggaran yang tidak disengaja.
- Sulit dalam membedakan penangkapan ikan IUU aktual dari penangkapan ikan skala tradisional, informal, skala kecil yang sering terjadi di negara-negara berkembang.
- Penilaian stok perikanan memberatkan negara berkembang.
- Kejelasan yang lebih besar diperlukan untuk penyediaan pada status bendera.
- Melarang subsidi biaya modal dan biaya operasional memperlambat pengembangan sektor perikanan di negara berkembang.
- Kekuatan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya akan diambil dari komunitas lokal.
- Proposal saat ini untuk Perawatan Khusus dan Diferensial tidak cukup.
- Penting untuk memastikan bahwa ada ukiran yang cukup untuk memungkinkan akses nelayan skala kecil ke subsidi yang diperlukan untuk menurunkan modal dan biaya operasi untuk pengembangan komunitas mereka.

Referensi:

Notohamijoya A, Wiyata, A & Billah M 2019, Sustainable fisheries subsidies for small scale fisheries in Indonesia, ICESD. Pacific Network on Globalization (PANG) 2020, Big impacts for small scale fishers.
Sumaila, U, Ebrahim, N, Schuhbauer, A, Skerritt, D, Li, Y, Kim, H, Mallory, T, Lam, V & Pauly, D 2019, 'Updated estimates and analysis of global fisheries subsidies', Marine Policy, vol.109, no.130695.
Tipping, A & Irschlenger, T 2020, WTO negotiations on fisheries subsidies: What's the state of play? GSI policy brief, International Institute for Sustainable Development.
WTO 2002, A fishery subsidies guide, viewed 15 January 2021, A FISHERIES SUBSIDIES GUIDE (fao.org).

Bacaan lebih lanjut tentang Subsidi Perikanan:

Kunjungi WTO di World Trade Organization - Home page - Global trade (wto.org)
Kunjungi Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Home | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)

Secretariat:

Indonesia for Global Justice

Jl. Kalibata Tengah 1A, Pancoran, Jakarta Selatan. 12740

Telp: (021) 7941655, Email. igj@igj.or.id, Web: igj.or.id